



BUPATI KOTABARU  
PROVINSI KALIMANTAN SELATAN

PERATURAN BUPATI KOTABARU

NOMOR 72 TAHUN 2020

TENTANG

PENETAPAN DAN PENEGASAN BATAS WILAYAH ADMINISTRASI  
DESA MULYODADI KECAMATAN PAMUKAN SELATAN  
KABUPATEN KOTABARU

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KOTABARU,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan Penelitian Dokumen Batas Desa dan Peraturan Bupati Kotabaru Nomor 47 Tahun 2020 tentang Batas Wilayah Administrasi Desa Sakalimau dengan Desa Mulyodadi Kecamatan Pamukan Selatan, Peraturan Bupati Kotabaru Nomor 49 Tahun 2020 tentang Batas Wilayah Administrasi Desa Tanjung Samalantakan dengan Desa Mulyodadi Kecamatan Pamukan Selatan, dan Peraturan Bupati Kotabaru Nomor 51 Tahun 2020 tentang Batas Wilayah Administrasi Desa Basuang Kecamatan Sampanahan dengan Desa Mulyodadi Kecamatan Pamukan Selatan, serta dalam rangka tertib administrasi pemerintahan untuk memberikan kejelasan dan kepastian hukum terhadap batas wilayah administrasi Desa Mulyodadi Kecamatan Pamukan Selatan Kabupaten Kotabaru;
- b. bahwa untuk memberikan kepastian hukum kepada desa dan batasan wilayah penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan suatu desa dengan kelurahan atau desa lainnya di Kabupaten Kotabaru perlu dilakukan penetapan dan penegasan batas wilayah administrasi Desa;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Penetapan dan Penegasan Batas Wilayah Administrasi Desa Mulyodadi Kecamatan Pamukan Selatan Kabupaten Kotabaru;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9) sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);

2. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2011 tentang Informasi Geospasial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5214);
3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 45 Tahun 2016 tentang Pedoman Penetapan dan Penegasan Batas Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1038);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 141 Tahun 2017 tentang Penegasan Batas Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 79);
9. Peraturan Bupati Kotabaru Nomor 47 Tahun 2020 tentang Batas Wilayah Administrasi Desa Sakalimau dengan Desa Mulyodadi Kecamatan Pamukan Selatan Kabupaten Kotabaru (Berita Daerah Kabupaten Kotabaru Tahun 2020 Nomor 47);

10. Peraturan Bupati Kotabaru Nomor 49 Tahun 2020 tentang Batas Wilayah Administrasi Desa Tanjung Samalantakan dengan Desa Mulyodadi Kecamatan Pamukan Selatan Kabupaten Kotabaru (Berita Daerah Kabupaten Kotabaru Tahun 2020 Nomor 49);
11. Peraturan Bupati Kotabaru Nomor 51 Tahun 2020 tentang Batas Wilayah Administrasi Desa Basuang Kecamatan Sampanahan dengan Desa Mulyodadi Kecamatan Pamukan Selatan Kabupaten Kotabaru (Berita Daerah Kabupaten Kotabaru Tahun 2020 Nomor 51);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PENETAPAN DAN PENEKASAN BATAS WILAYAH ADMINISTRASI DESA MULYODADI KECAMATAN PAMUKAN SELATAN KABUPATEN KOTABARU.

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Kotabaru.
2. Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Kepala Daerah yang selanjutnya disebut Bupati adalah Bupati Kotabaru.
4. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa dibantu Perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa.
5. Batas adalah tanda pemisah antara Desa yang bersebelahan baik berupa batas alam maupun batas buatan.
6. Penetapan batas Desa adalah proses penetapan batas Desa secara kartometrik di atas suatu peta dasar yang disepakati.
7. Penekasan batas Desa adalah kegiatan penentuan titik-titik koordinat batas Desa yang dapat dilakukan dengan metode kartometrik dan/atau survey dilapangan, yang dituangkan dalam bentuk peta batas dengan daftar titik-titik koordinat batas Desa.
8. Titik Koordinat Kartometrik yang selanjutnya disingkat TK adalah koordinat hasil pengukuran/penghitungan posisi titik dengan menggunakan peta dasar.

## Pasal 2

Dengan Peraturan Bupati ini ditetapkan dan ditegaskan Batas Wilayah Administrasi Desa Mulyodadi Kecamatan Pamukan Selatan Kabupaten Kotabaru dengan luasannya  $\pm 1.084$  hektare atau seluas  $\pm 11$  kilometer persegi, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 sebagai berikut :

- a. Batas Utara : Desa Tanjung Samalantakan.
- b. Batas Barat : Laut.
- c. Batas Timur : Desa Basuang.
- d. Batas Selatan : Desa Sakalimau.

## Pasal 3

Penetapan dan Penegasan Batas Wilayah Administrasi Desa Mulyodadi Kecamatan Pamukan Selatan Kabupaten Kotabaru sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 sebagai berikut :

1. Peraturan Bupati Kotabaru Nomor 47 Tahun 2020 tentang Batas Wilayah Administrasi Desa Sakalimau dengan Desa Mulyodadi Kecamatan Pamukan Selatan Kabupaten Kotabaru (Berita Daerah Kabupaten Kotabaru Tahun 2020 Nomor 47); yaitu:
  - a. Bahwa terkait penyelesaian Batas Wilayah Administrasi Desa Sakalimau dengan Desa Mulyodadi Kecamatan Pamukan Selatan Kabupaten Kotabaru, kedua Desa sepakat tarikan administrasi desa di mulai dari titik 01 dengan titik koordinat  $2^{\circ} 37' 43,820''$  LS dan  $116^{\circ} 22' 55,039''$  BT (titik Koordinat berada pada sisi laut);
  - b. Dari titik 01 garis batas wilayah administrasi tarik lurus ke titik 02 dengan titik koordinat  $2^{\circ} 37' 38,323''$  LS dan  $116^{\circ} 21' 54,095''$  BT;
  - c. Dari titik 02 garis batas wilayah administrasi mengikuti peta rancang kapling transmigrasi menuju ke titik 03 dengan titik koordinat  $2^{\circ} 37' 41,823''$  LS dan  $116^{\circ} 21' 21,203''$  BT (titik koordinat berada pada Tugu Batas Desa Sakalimau dengan Desa Mulyodadi);
  - d. Dari titik 03 garis batas wilayah administrasi tarik lurus atau mengikuti jalan menuju ke titik 04 dengan titik koordinat  $2^{\circ} 37' 32,891''$  LS dan  $116^{\circ} 21' 17,894''$ ; dan
  - e. Dari titik 04 garis batas wilayah administrasi mengikuti peta rancang kapling transmigrasi menuju ke titik 05 dengan titik koordinat  $2^{\circ} 37' 32,057''$  LS dan  $116^{\circ} 21' 0,733''$  BT (titik koordinat berada pada pertigaan batas wilayah administrasi Desa Basuang, Desa Sakalimau dan Desa Mulyodadi).

2. Peraturan Bupati Kotabaru Nomor 49 Tahun 2020 tentang Batas Wilayah Administrasi Desa Tanjung Samalantakan dengan Desa Mulyodadi Kecamatan Pamukan Selatan Kabupaten Kotabaru (Berita Daerah Kabupaten Kotabaru Tahun 2020 Nomor 49) yaitu:
  - a. Bahwa terkait penyelesaian Batas Wilayah Administrasi Desa Tanjung Samalantakan dengan Desa Mulyodadi Kecamatan Pamukan Selatan Kabupaten Kotabaru, kedua Desa sepakat tarikan administrasi desa di mulai dari titik 01 dengan titik koordinat  $2^{\circ} 36' 47,274''$  LS dan  $116^{\circ} 23' 33,547''$  BT (titik Koordinat berada pada sisi laut);
  - b. Dari titik 01 garis batas administrasi tarik lurus menuju ke titik 02 dengan titik koordinat  $2^{\circ} 36' 15,850''$  LS dan  $116^{\circ} 22' 13,795''$  BT (garis batas mengikuti hasil Deleniasi batas administrasi Tahun 2018);
  - c. Dari titik 02 garis batas administrasi tarik lurus menuju ke titik 03 dengan titik koordinat  $2^{\circ} 35' 54,603''$  LS dan  $116^{\circ} 22' 14,421''$  BT; dan
  - d. Dari titik 03 garis batas administrasi tarik lurus menuju ke titik 04 dengan titik koordinat  $2^{\circ} 35' 51,786''$  LS dan  $116^{\circ} 21' 23,266''$  BT.
  
3. Peraturan Bupati Kotabaru Nomor 51 Tahun 2020 tentang Batas Wilayah Administrasi Desa Basuang Kecamatan Sampanahan dengan Desa Mulyodadi Kecamatan Pamukan Selatan Kabupaten Kotabaru (Berita Daerah Kabupaten Kotabaru Tahun 2020 Nomor 51) yaitu:
  - a. Bahwa terkait penyelesaian Batas Wilayah Administrasi Desa Basuang Kecamatan Sampanahan dengan Desa Mulyodadi Kecamatan Pamukan Selatan Kabupaten Kotabaru, kedua Desa sepakat tarikan administrasi desa di mulai dari titik 01 dengan titik koordinat  $2^{\circ} 37' 32,057''$  LS dan  $116^{\circ} 21' 0,733''$  BT (titik Koordinat berada pada Pertigaan batas administrasi Desa Sekalimau, Desa Basuang dan Desa Mulyodadi);
  - b. Dari titik 01 garis batas wilayah administrasi tarik lurus menuju ke titik 02 dengan titik koordinat  $2^{\circ} 37' 9,416''$  LS dan  $116^{\circ} 21' 4,439''$  BT;
  - c. Dari titik 02 garis batas wilayah administrasi mengikuti Peta rancang kapling transmigrasi Desa Mulyodadi menuju ke titik 03 dengan titik koordinat  $2^{\circ} 36' 52,112''$  LS dan  $116^{\circ} 21' 8,852''$  BT;
  - d. Dari titik 03 garis batas wilayah administrasi tarik lurus menuju ke titik 04 dengan titik koordinat  $2^{\circ} 35' 51,223''$  LS dan  $116^{\circ} 21' 13,171''$  BT; dan

- e. Dari titik 04 garis batas wilayah administrasi tarik lurus mengikuti garis batas wilayah administrasi menuju ke titik 05 dengan titik koordinat  $2^{\circ} 35' 51,786''$  LS dan  $116^{\circ} 21' 23,266''$  BT (titik koordinat berada pada pertigaan batas wilayah administrasi Desa Mulyodadi, Desa Basuang dan Desa Tanjung Samalantakan).

#### Pasal 4

Posisi TK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 bersifat tetap dan tidak berubah akibat perubahan nama desa, nama kelurahan dan/atau nama kecamatan.

#### Pasal 5

Batas Wilayah Administrasi Desa Mulyodadi Kecamatan Pamukan Selatan dan koordinat batas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 tercantum di peta dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

#### Pasal 6

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Kotabaru.

Ditetapkan di Kotabaru  
pada tanggal 20 Mei 2020

BUPATI KOTABARU,

ttd

SAYED JAFAR

Diundangkan di Kotabaru  
pada tanggal 20 Mei 2020

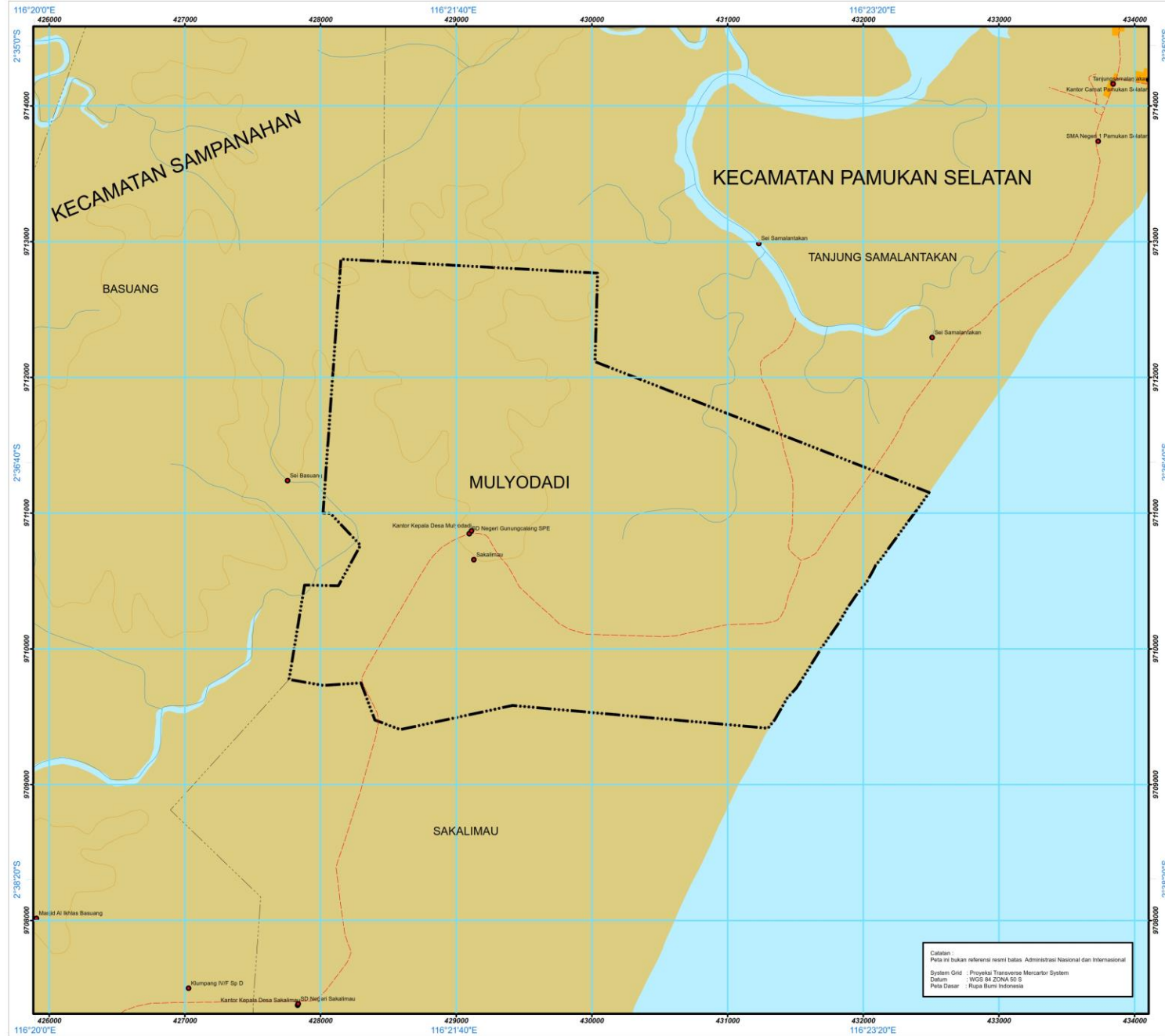
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN KOTABARU,

ttd

SAID AKHMAD

BERITA DAERAH KABUPATEN KOTABARU  
TAHUN 2020 NOMOR 72

LAMPIRAN  
 PERATURAN BUPATI KOTABARU  
 NOMOR : TAHUN 2020  
 TENTANG  
 PENETAPAN DAN PENEGASAN BATAS WILAYAH ADMINISTRASI  
 DESA MULYODADI KECAMATAN PAMUKAN SELATAN  
 KABUPATEN KOTABARU PROVINSI KALIMANTAN SELATAN



PEMERINTAH KABUPATEN KOTABARU  
 SEKRETARIAT DAERAH

PETA WILAYAH ADMINISTRASI DESA MULYODADI  
 KECAMATAN PAMUKAN SELATAN  
 KABUPATEN KOTABARU PROVINSI KALIMANTAN SELATAN



SKALA 1 : 30.000

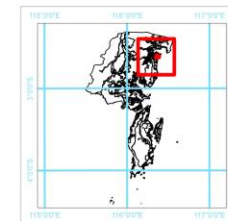
Batas - batas :  
 Utara : Tanjung Samalantakan  
 Barat : Laut  
 Timur : Basuang  
 Selatan : Sakalimau

Luas : 11 Kilo Meter Persegi / 1.084 Hektare

**Keterangan :**

- Toponimi
- Batas Administrasi Wilayah Desa
- Jalan
- ~~~ Sungai
- Kontur
- Wilayah Desa Mulyodadi
- Pemukiman
- Tubuh Air

Sumber Peta :  
 1. Peta RT/RW Kabupaten Kotabaru Nomor 11 Tahun 2012;  
 2. Peta Rupa Bumi Indonesia;  
 3. Peraturan Bupati tentang Batas Wilayah Desa Mulyodadi.



Catatan :  
 Peta ini bukan referensi resmi batas Administratif Nasional dan Internasional  
 System Grid : Proyeksi Transverse Mercator System  
 Datum : WGS 84 ZONA 50 S  
 Peta Dasar : Rupa Bumi Indonesia

BUPATI KOTABARU,

SAYED JAFAR